



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI PROGRAM
PENDIDIKAN NONFORMAL
(Study Kasus di Partai Keadilan Sejahtera)**

Ilmar Andi Achmad

Program Studi Pendidikan Nonformal, FKIP UMB
(email: ilmarandiachmad@umbulukumba.ac.id)

Henra Saputra Tanjung

Program Study Pendidikan Matematika, STKIP Bina Bangsa Meulaboh
(email: hnr.saputra@gmail.com)

Florianus Aloysius Nay

Program Study Matematika, Universitas San Pedro
(email: olandnay@unisap.ac.id)

Jimmy Charter Atty

Program Studi PJKR, Universitas Kristen Artha Wacana
(email: charteratty@gmail.com)

Abstrak

Pendidikan politik bagi partai politik merupakan wadah peningkatan dan penguatan kualitas kader partai politik. Dalam suasana perkembangan partai politik di Indonesia, terdapat kecenderungan menurunnya kualitas para kader partai, sehingga dibutuhkan pendidikan politik sebagai sebuah solusi akselerasi kualitas kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan politik, khususnya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik PKS Kabupaten Sinjai dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu, pendidikan politik PKS Kabupaten Sinjai pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi keagamaan, hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: a) adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik, b) komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPR yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, c) sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik, d) terbatasnya dana, dan e) kurangnya kader partai yang dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Partai Keadilan Sejahtera.



Pendahuluan

Ketika berbicara politik maka tidak terlepas dari istilah elit politik. Surbakti menjelaskan elit politik (dalam Eko Handoyo 2010:144) bahwa dalam sebuah kelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan dan pembuatan keputusan politik. Tapi, Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, terdapat seperangkat alat untuk menggerakkan sistem pemerintahan agar asas demokrasi terwujud dengan baik. Salah satu perangkat alat itu adalah partai politik. Partai politik kemudian dijadikan sebagai instrumen penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga bisa dikatakan bahwa bekerjanya dan berfungsinya pemerintahan yang demokratis terletak pada partai politik.

Perilaku dan sikap berbagai partai politik terkesan sudah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini, kian diperparah oleh tindakan dan sikap Sikap dan perilaku dari anggota partai politik di parlemen. Mereka tidak menjalankan tugasnya sebagai penyalur aspirasi rakyat melainkan penyalur aspirasi partai politik. Belum lagi, dari pejabat teras partai politik atau elit politik yang hanya mendahulukan kepentingan partai politiknya. Mereka melupakan dasar perjuangan membentuk partai politik. Akibat dari perlakuan seperti ini adalah menjamurnya partai politik tanpa ada identitas politiknya. Kondisi seperti ini menjadikan kehidupan politik sulit mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada partai politik maka dapat merujuk dan mengingatkan kembali bahwa salah satu fungsi partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik dan tertuang dalam pasal 1 ayat (4) UU No.2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ilmar bahwa Pendidikan dilaksanakan demi tujuan tertentu dan menunjuk kepada proses yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana sosialisasi, apalagi hanya meneruskan informasi yang terlepas serta kosong makna.

(Ilmar.2019,10.2:2-11. <https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v10i2.291>.)

PKS melaksanakan pendidikan politik tidak hanya dilakukan di jenjang nasional tetapi dilakukan sampai ke tingkat daerah. Salah satu Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS yang secara konsisten memberikan pendidikan politik dalam masyarakat adalah PKS Sinjai. Pada suatu penelitian awal yang peneliti laksanakan secara wawancara kepada sekretaris umum Pengurus DPD PKS Sinjai memiliki ciri khusus yaitu terletak materi keagamaan sebagai nilai dasar bagi anggota dan juga menandakan sebagai partai berbasis dakwah dan sosial. Melalui pendidikan politik yang dimaksud maka Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sinjai membuat PKS menjadi salah satu partai dipertimbangkan dan memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat Sinjai.

Dari berbagai hal mendasar di atas maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam peranan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat berdemokrasi di Indonesia, sehingga penulis menuliskannya dalam bentuk penelitian case study yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sinjai”.

Tinjauan Pustaka

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Budiarjo (2005:60) mengatakan bahwa secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kedudukan politik dan kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk mengaplikasikan kebijakan-kebijakan mereka.

2. Fungsi partai politik

Jika merujuk pada UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat 1, partai

politik memiliki fungsi sebagai sarana yaitu (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

B. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Menurut Kartono (1989:13) istilah untuk pendidikan politik adalah *politische bildung* atau *political forming*. Sebutan “forming” karena mengandung keinginan pembentukan manusia politik yang sadar akan posisi politiknya di dalam masyarakat. Kemudian disebut “bildung” karena sebutan tersebut memiliki pengertian pembentukan personal dari manusia dengan tanggung jawab dan kesadaran sendiri untuk menjadi manusia politik.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Menurut Prihatmoko (2003: 180) bahwa partai politik bertujuan untuk menumbuhkan dan membentuk kesadaran politik dan kepribadian politik, juga memiliki tujuan untuk menggalang kecakapan dalam berpartisipasi pada setiap masyarakat agar menjadi partisipan politik yang positif.

3. Peran Serta Partai Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik

Menurut Muis (2000:124) bahwa terkhusus untuk partai politik di negara berkembang, partai politik sangat berperan penting dalam mengubah dan menciptakan kultur politik. Media pendidikan politik yang sesungguhnya terindikasi dengan bangkitnya berbagai partai politik dalam suatu masyarakat.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2009: 57) mengatakan bahwa pemberdayaan secara teori, berasal dari kata *power* (keberdayaan dan kekuasaan). Olehnya itu, gagasan utama pemberdayaan erat kaitannya dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan terkadang dikaitkan dengan kompetensi masyarakat dalam membuat orang lain melaksanakan apa yang diinginkan sesuai dengan minat dan keinginan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Berkaitan dengan PKS, ada beberapa buku ataupun artikel yang membahasnya. Beberapa membahas bagian ideologi PKS, beberapa tertarik dengan progres PKS dari 2004 dan 2009, dan lainnya tertarik membahas aspek kesejarahan PKS yang kian berkembang. Namun yang sangat disayangkan setelah pemilu 2009, amat sedikit karya tulis ilmiah yang tersistematis dalam mengobservasi tindakan politik PKS.

Metode

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif (penggambaran) berupa kata-kata lisan yang berasal dari manusia dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif analisis (Moleong, 2009:4).

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi ditetapkan maka lebih terjangkau untuk mengetahui tempat penelitian dilaksanakan. Adapun penelitian ini berlokasi di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sinjai.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil

1. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sinjai

a. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sinjai

Layaknya dengan perubahan politik di tingkat nasional maupun provinsi, PKS Kabupaten Sinjai juga mengalami perubahan yang sama baik perubahan namadari Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera, dinamisasi struktur pun gerakan kelembagaan dan anggota terbina yang menjadi anggota dewan di parlemen..

PK Kabupaten Sinjai diresmikan dan dilantik pada tahun 1998, pada tahun itu ada lima orang deklaratator berdirinya PK Sinjai yaitu Syamsul Rijal Junaid, Ramli Mansyur, Hasbi, Ishak Syamsuddin, dan Amir Hamzah. Tempat deklarasinya di masjid At-Tijarah, Sinjai Utara. Pada tahun yang sama ditunjuk Syamsul Rijal Junaid sebagai ketua dan Syamsul Rijal Oddek sebagai sekretaris dan Drs. Yusran sebagai Bendahara.

b. Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kabupaten Sinjai

Dalam hasil penelitian ini, pelaksanaan pendidikan politik di PKS Sinjai dilaksanakan dengan tahapan (1) membuat program pendidikan politik (2) melaksanakan program pendidikan politik. dengan uraian hasil sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kabupaten Sinjai

Lazimnya partai politik Anggaran Dasar (AD) adalah sumber kebijakan tertinggi dalam partai politik yang dijadikan acuan atau aturan main untuk dalam melaksanakan kegiatan politik dimanapun dan kapanpun. Lain halnya Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berisikan aturan yang menjelaskan tindak lanjut mengenai aturan yang bersumber dari Anggaran Dasar partai politik. Begitupun dengan PKS ini, Anggaran Dasar dijadikan pedoman oleh pengurus maupun anggota dalam menjalankan roda kegiatan partai. Olehnya itu dapat diartikan bahwa

Anggaran Dasar memberikan arah kepada PKS perihal apa yang seharusnya dilaksanakan dan seperti apa yang tidak harus dilaksanakan oleh PKS.

2. Pelatihan

Program Pelatihan bagi Anggota PKS adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKS dari tingkat kabupaten hingga di tingkat desa/kelurahan. Program pelatihan ini berfokus pada anggota partai dengan jenjang pendukung dan terbina yang terdiri dari anggota pemula, anggota siaga, anggota muda dan anggota pratama turut juga masyarakat non partisan.

3. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu proses pembentukan sumber daya manusia yang bertujuan: memperkuat komitmen pada nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kepartaian, memperkuat ikatan antar anggota sehingga tercapai soliditas partai, dan mewujudkan persaudaraan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan berorganisasi dalam partai. Program Pembinaan dilaksanakan kepada anggota-anggota dengan jenjang anggota muda dan anggota pratama. Dalam Rakerda (Rapat Kerja Daerah) PKS kab. Sinjai tahun 2021, terkait sarana pembinaan antara lain pelatihan spiritual anggota, wisata, berkunjung ke anggota unit pembinaan anggota lain, dan kunjungan ke tokoh.

4. Pemberdayaan

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PKS adalah bentuk pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan yang dimaksud akan berimplikasi pada efek dukungan di pemilu mendatang. dalam penyusunan program pemberdayaan di PKS mengacu program dari tim gugus tugas Pemenangan dari Desa yang telah dipatenkan oleh pengurus Pusat PKS. dalam pemberdayaan PKS maka pertama yang dilaksanakan adalah pemberian materi dan selanjutnya pendampingan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan. ini dilaksanakan oleh anggota PKS yang berada di desa dengan peruntukan anggota yang berjenjang keanggotaan pemula dan siaga.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas yang dilaksanakan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi kepada informan yaitu ketua DPD PKS kab. Sinjai, sekretaris umum PKS Sinjai dan ketua kaderisasi PKS Sinjai, Anggota Legislatif PKS di DPRD Sinjai dan peserta non anggota mengikuti kegiatan pendidikan politik kemudian dengan menghimpun data, dokumen, dan arsip dari PKS kab. Sinjai maka pembahasannya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sinjai

Salah satu fungsi partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 berkaitan partai politik, dalam menyusun program kerja sebuah partai harus menghadirkan kurikulum pendidikan politik di dalam program kerja tersebut bagi anggota maupun masyarakat umum.

2. Kendala di dalam Pendidikan Politik PKS kab. Sinjai serta Langkah Mengatasinya

PKS kab. Sinjai melaksanakan proses pendidikan politik tidak seutuhnya bekerja sesuai dengan keinginan anggota partai dan masyarakat yang terlibat dalam pendidikan politik. Hal itu disebabkan oleh adanya kendala sehingga meninggalkan jejak yang belum maksimal.

Kendala tersebut antara lain karena terdapat anggapan masyarakat yang tidak positif terhadap partai politik. Sikap pragmatisme masyarakat bahwa politik itu identik dengan ambisi, culas, dan politik identik dengan menghamburkan materi, dimana yang mempunyai materilah yang memperoleh kemenangan dalam berpolitik. Sebagai wadah politik maka partai politik tentunya menjadi sarang empuk bagi pemikiran pragmatis di atas. Belum lagi, media memperparah dengan berbagai jenis berita negatif terhadap partai politik. Partai politik dijadikan kendaraan ambisi personal, partai politik adalah bagi-bagi kekuasaan tanpa

menghiraukan kepentingan masyarakat. belum lagi berita korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik yang terdapat dalam bangku pemerintahan maupun parlemen. Sehingga efeknya adalah partai politik kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Kendala berikutnya adalah miskomunikasi antar pengurus yang notabene adalah ujung tombak dalam program pendidikan politik. Hal tersebut disebabkan oleh terdapat anggota maupun pengurus yang tidak aktif tanpa ada pemberitahuan. dengan adanya perlakuan seperti ini maka program pendidikan politik sulit dijalankan.

Sarana dan prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS kab. Sinjai. Sampai saat ini, PKS kab. Sinjai belum mempunyai sarana dan prasarana yang representatif untuk pelaksanaan pendidikan politik. kekurangan sarana pendukung lainnya seperti sarana elektronik pembelajaran dalam melakukan pendidikan politik yang acap kali digunakan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan politik.

Kendala lain yaitu alokasi dana yang belum cukup. Kurangnya dana membuat program pendidikan politik tidak dilaksanakan secara maksimal. Walaupun PKS kab. Sinjai dalam menjalan program pendidikan politik tidak berdasar dari dana yang tersedia tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dana amatlah penting dalam melancarkan pendidikan politik. Karena dana tersebut digunakan untuk operasional pendidikan politik, akomodasi, serta konsumsi dalam pendidikan politik.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk pendidikan politik yang digunakan oleh PKS kab. Sinjai adalah berbentuk pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan. Pelaksanaan pendidikan politik ditetapkan berdasarkan kondisi yang terjadwal, rutin, dan tepat. Akan

tetapi, tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi yang telah disepakati.

2. Kurikulum dalam pendidikan politik PKS kab. Sinjai tidak hanya bermuatan politis saja tetapi lebih banyak bermuatan keagamaan.
3. Pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berlangsung sesuai dengan perencanaan, acapkali ada kendala-kendala, antara lain: a) adanya anggapan masyarakat yang tidak positif terhadap partai politik, b) miskomunikasi antar pengurus, c) Sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik, d) alokasi dana yang belum cukup, dan e) kurangnya anggota partai yang mampu menjadi pemateri atau narasumber dalam pendidikan politik.
4. Upaya yang dilaksanakan PKS kab. Sinjai untuk mengatasi kendala dalam pendidikan politik dengan cara: a) berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, b) menyelesaikan permasalahan komunikasi ini dengan cara konsolidasi internal, c) menyewa atau meminjam di gedung milik ormas, yayasan atau lembaga pendidikan di kabupaten Sinjai, sedangkan sarana pendukung lainnya dengan menyewa atau meminjam, d) dengan mengkombinasikan berbagai program pendidikan politik menjadi satu kegiatan agar penggunaan dana lebih optimal, dan e) menghadirkan pemateri dari eksternal partai yang ahli dalam bidangnya dan juga meminta bantuan dari pemateri internal partai yang berasal dari luar kabupaten Sinjai..

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam meneliti masalah pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS kab. Sinjai maka ada beberapa saran dari peneliti yaitu:

- a. Pengurus PKS kab. Sinjai perlu membuat kegiatan atau pelatihan semacam pengarsipan, pembuatan laporan, dan teknik dokumentasi agar dapat memiliki kemampuan menyusun dokumen dengan baik.
- b. PKS kab. Sinjai dalam melaksanakan program kerja terkait pendidikan

politik sebisa mungkin meningkatkan kepercayaan publik dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat agar program ini terlaksana dengan maksimal.

- c. PKS kab. Sinjai juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pembawa ruh pendidikan agar masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan politik akibat dari proses pendidikan politik.

Referensi

Buku dengan satu pengarang

Referensi:

Friedmann. 1992. *Empowement: the Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.

Dalam teks: (Friedmann, 1992)

Buku dengan dua pengarang

Referensi :

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Aritasius,
Dalam teks : (Arikunto & Suharsini , 2002)

Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Mandar Maju.

Dalam teks : (Kartono & Kartini , 1989)

Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
Mufid, Muhammad. 2004. *Politik Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Dalam teks : (Meleong& Lexy , 2009)

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jakarta: PT.Refika Aditama.

Dalam teks : (Suhartono & Edi , 2009)

Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: ICRiSoD.

Dalam teks : (Suryadi & Budi , 2006)

Thaha, Idris. 2005. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju.

Dalam teks : (Thaha & Idris , 2005)

Buku dengan tiga pengarang atau lebih

Referensi :

Sugiya, Dkk. 2004. Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta: Buku Kompas

Dalam teks : (Sugita et al., 2004)

Ismail dan Mukti, Abdul (ed). 2007. Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dalam teks : (Ismail et al., 2007)

Bab atau Artikel dalam Buku Diedit

Referensi :

Hermann, M. G. (2008). Content Analysis. In A. Klotz & D. Prakash (Eds.), *Research methods series. Qualitative methods in international relations* (pp. 151–167). Palgrave Macmillan.

Dalam teks: (Hermann, 2008)

Artikel Jurnal dengan DOI

Referensi:

Achmad, Ilmar Andi, Et Al. Pola Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Sebagai Program Pendidikan Non Formal (Studi Kasus di SKB Bulukumba):(Studi Kasus di SKB Bulukumba). Jurnal AKRAB, 2019, 10.2: 2-11.
<https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v10i2.291>

Dalam teks: (Achmad et al., 2019)